



DOKUMEN



TAHUN 2022

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI GEDUNG PRAJA WIBAWA

Jl. Raden Demang Hardjakusumah

Telp./Fax. 022-6642209 Kota Cimahi 40513

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang kemudian disingkat Renja SKPD adalah salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari perencanaan daerah, sehingga penyusunannya harus mengacu pada dokumen-dokumen induknya, yaitu Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat 3 huruf e menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kemudian pada Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Berdasarkan hasil verifikasi penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207). Dimana dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran digabung kedalam satu perangkat daerah, dengan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

Berkaitan dengan Renja Perubahan 2022, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai SKPD yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kota Cimahi tentunya juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Renja Satpol PP dan Damkar). Renja Perubahan 2022 Satpol PP dan Damkar pada intinya memuat apa yang akan dilakukan di tahun rencana (2022), yang kemudian akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2022.

Dokumen Renja ini diharapkan mampu menjadi panduan seluruh unsur yang berada dalam struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan 2022 Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 merujuk pada sejumlah peraturan yang berlaku pada saat disusunnya dokumen ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan 2022 Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai panduan pelaksanaan pembangunan, khususnya pada urusan yang menjadi kewenangan Satpol PP dan Damkar pada tahun rencana. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif di tahun 2022;
2. Pedoman untuk menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan 2022 Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan 2022 Satpol PP dan Damkar Tahun 2022.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

Menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Satpol PP dan Damkar Tahun berjalan, pencapaian Renstra 2023-2026, analisis pencapaian kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), isu-isu strategis berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan

terhadap usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kota.

4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang harapan dari penyusunan Renja Perubahan 2022 Satpol PP dan Damkar.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan	100%

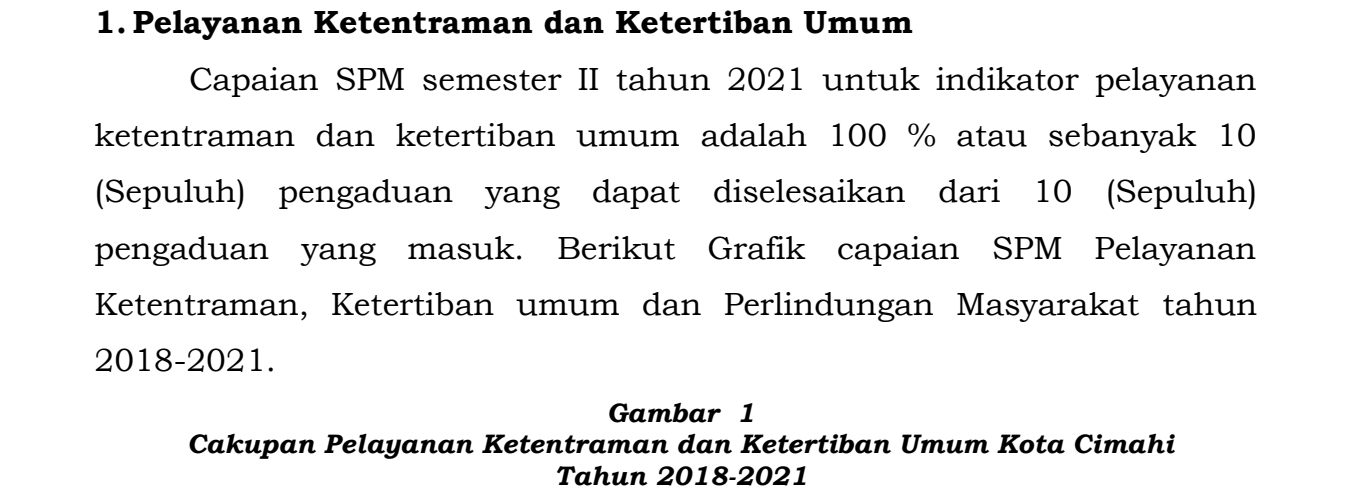
A. REALISASI

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

Realisasi Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN TAHUN 2021 SEMESTER 2		
					SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	43,52	100	15 Pengaduan	15 Pengaduan	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	86,96	100	90.24	60 Kejadian	54 Kejadian yang respon time	90



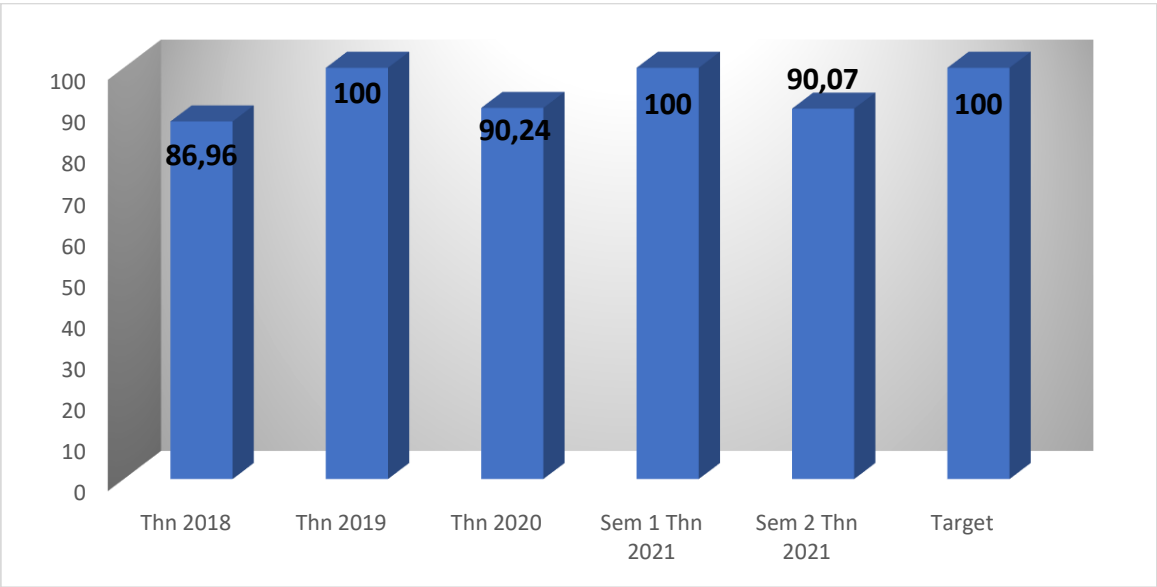
Capaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada semester II tahun 2021 sebesar 100% dari target 100%, hal ini

terjadi karena capaian pada semester I di tahun 2021 terdapat 1 data pengaduan yang tidak terselesaikan dari 9 data pengaduan yang masuk.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2020 sebesar 90,24 % atau sebanyak 37 Kejadian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 41 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020, sedangkan capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuai korban kebakaran sampai dengan semester II tahun 2021 sebesar 90% atau sebanyak 60 kejadian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi diantaranya 56 kejadian dalam Kota dan 6 Kejadian diluar Kota Cimahi.sampai dengan semester II Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 54 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2021.

Gambar 2
Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Tahun 2018-2021



Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran pada semester II Tahun 2021 sebesar 90,07 % dari target 100%, hal ini karena terpenuhinya 54 kejadian kebakaran pada waktu tanggap atau kurang dari sama dengan 15 menit dari total 60 kejadian kebakaran di kota cimahi. Dan 6 Kejadian perbantuan Luar Kota Cimahi.

B. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Cimahi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengalokasikan anggaran dari dana APBD untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat maupun OPD (Unjuk Rasa, Bangunan Liar, Spanduk / Baligho, Anak jalanan / ODGJ, Ijin Usaha, Dll.) yang berkenaan dengan indikasi Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
3. Penertiban PKL;
4. Penindakan pelanggaran PERDA;
5. Penyelenggaraan Bintek dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS dan Penegak Perda;
6. Layanan ganti rugi yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada;
7. Patroli siaga kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan korban non kebakaran;
8. Penanganan kebakaran;
9. Sosialisasi dan edukasi masyarakat siaga kebakaran.

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian urusan Bidang bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Kota Cimahi. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3

Besaran Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Renja 2022

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Cimahi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
													Sebelum					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							23.029.210.058				15.390.697.000		
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							18.529.641.958				6.973.815.000		
1	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							425.349.400				770.000.000		
1	0	0	2.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra Jumlah Forum SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah			2 Dokumen 1 Dokumen 1 kali	20.566.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35.000.000	
1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai LAKIP	jumlah Dokumen Anggaran	Nilai Sakip Perangkat Daerah			4 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35.000.000	
1	0	0	2.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Jumlah Dokumen LKIP Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen monev kinerja bulanan Jumlah dokumen monev kinerja tahunan Jumlah dokumen monev kinerja triwulan Jumlah SOP yang disusun Nilai SKM perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah			4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 dokumen 2 SOP 80 index	389.783.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700.000.000	
1	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15.987.012.758				103.615.000		
1	0	0	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji dan tunjangan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			121 Pegawai ASN	15.931.372.758	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer				0	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
																				Sebelum
														Umum-Dana Alokasi Umum						
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			1 Dokumen		10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25.000.000		
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			12 Dokumen		45.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				78.615.000		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							92.010.000					625.200.000			
1	05	01	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ASN Yang Dibina	Jumlah Bimbingan Teknis	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi			3 kali		92.010.000					125.000.000		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							389.077.800					1.241.000.000			
1	05	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan penyediaan komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			12 Bulan		9.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24.000.000		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			12 bulan		102.317.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85.000.000		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Penyediaan bahan pokok/natura Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			12 bulan 12 Bulan		44.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				170.000.000		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Realisasi Anggaran	1. Jenis Cetak Tata naskah dinas 2. Jumlah Bulan Penyediaan Penggandaan dan Cetak Cover 3. Cetak Sticker Label Barang Bukti 4. Cetak Stiker Segel 5. Cetak Sticker ditutup 6. Pol PP Line 7. Cetak sticker Tanda pemeriksaan 8. Cetak Sticker Rekomendasi Penempatan Alat Proteksi Kebakaran 9. Cetak Sticker No Pelayanan Darurat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			9 Jenis 12 Bulan 100 lembar 100 lembar 110 lembar 1 roll 100 lembar 100 lembar 100 lembar		55.565.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130.000.000		
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum			12 bulan		3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
													Sebelum					
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum				45 orang/hari 201 orang/har		174.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								147.000.000			450.000.000		
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum				12 bulan 2 unit		147.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			400.000.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								345.090.000			1.084.000.000		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa surat Menyurat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum				12 bulan		38.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80.000.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Jasa Air Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Jumlah Bulan Jasa Listrik	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum				12 bulan 12 Bulan 12 Bulan		60.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			124.000.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor Jumlah Pegawai Non ASN yang diasuransikan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum				12 Bulan 86 Pegawai		246.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			880.000.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.144.102.000			2.700.000.000		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah bulan izin Spektrum Radio (ISR) Jumlah Kendaraan Operasional yang diasuransikan Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum				12 Bulan 27 unit 38 unit		1.092.102.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.600.000.000
1	05	01	2.09	01	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Rumah dan Gedung dinas yang dipelihara	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum				65 unit		52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2.541.475.000			4.590.000.000		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								1.799.213.000			3.380.000.000		
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Jumlah pelaksanaan pekat jumlah pelaksanaan penertiban PKL Jumlah penanganan Unjuk Rasa Pelaksanaan Penertiban anak sekolah Penertiban bangunan liar Penertiban Spanduk/baligho	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani				3 kali 12 kali 12 kali 2 kali 3 kali 12 kali		1.290.333.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.000.000.000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan	jumlah pelibatan linmas dalam peringatan HBHT Peringatan HUT linmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang				2 kali 1 kali		39.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			90.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
													Sebelum					
					Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	tingkat kota	Ditangani										
1		0 5	0 2	2.0 1	0 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Jumlah pembinaan Anggota linmas Jumlah Pendataan Anggota Linmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		6 kali 1 kali		61.780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100.000.000
1		0 5	0 2	2.0 1	0 7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Jumlah Pengamanan HUT Kota Cimahi Jumlah Pengamanan HUT Republik Indonesia Jumlah Pengamanan Idul Adha Jumlah Pengamanan Idul Fitri Jumlah Pengamanan Natal Jumlah Pengamanan Tahun Baru	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		1 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali		310.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200.000.000
1		0 5	0 2	2.0 1	1 0	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	1. Jumlah Pelayanan Kerugian Materil 2. Jumlah Pelayanan Pengobatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		12 Bangunan 24 kali		97.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200.000.000
1	0 5	0 2	2. 02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							733.260.000				1.190.000.000		
1	0 5	0 2	2.0 2	0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	jumlah pembinaan pelanggaran perda Jumlah penyuluhan ketentraman dan ketertiban	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda			12 kali 2 kali		122.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT				180.000.000
1	0 5	0 2	2.0 2	0 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah pendataan pelanggaran perda dan gangguan trantibum jumlah pengawasan pelanggaran perda Papan Hibauan	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda			12 kali 12 kali 5 buah		18.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60.000.000
1	0 5	0 2	2.0 2	0 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi barang kena cukai ilegal jumlah penegakan perda dan peraturan walikota jumlah sidang tindak pidana tingan	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda			0 kali 10 kali 10 kali		592.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT				950.000.000
1	0	0	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							9.002.000				20.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
													Sebelum					
	5	2	03															
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dan petugas penegakan perda	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda			1 kali	9.002.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20.000.000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							1.958.093.100				3.826.882.000		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.584.624.000				3.400.000.000		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah patroli siaga kebakaran dan penyelamatan korban	Persentase Korban yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran			720 kali	1.204.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2.400.000.000	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Cairan kimia AFFF 3%/6% Jumlah APD khusus kebakaran Jumlah Tabung yang diisi setiap triwulan	Persentase Korban yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran			12 kali 15 set 40 tabung	351.893.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500.000.000	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah APD khusus penyelamatan dan evakuasi Jumlah sarpras penyelamatan dan evakuasi lainnya	Persentase Korban yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran			5 set 1 set	28.531.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500.000.000	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							350.545.200				353.680.000		
1	05	04	2.01	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah potensi bangunan gedung yang wajib diperiksa	Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran			250 gedung	328.945.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				328.680.000	
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	1. Jumlah Pemeriksaan alat proteksi kebakaran	Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran			96 kali	21.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25.000.000	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							22.923.900				73.202.000		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran			5 kali	22.923.900					73.202.000	
TOTAL												23.029.210.058				15.390.697.000		

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kota Cimahi di tahun 2022 sangat terbatas di bandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

C. DUKUNGAN PERSONIL

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi terhitung 26 Agustus 2022 adalah 200 orang, terdiri dari 116 orang ASN dan 84 orang Tenaga Harian Lepas. Pejabat struktural 13 orang. Menurut jenjang Pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Pasca sarjana (S2) : 12 orang
- b. Sarjana (S1): 24 orang
- c. D IV : 2 orang
- d. Diploma (DIII): 5 orang
- e. SLTA:155 orang
- f. SMP: 2 orang

Jumlah Tenaga ASN menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pegawai Golongan IV : 6 orang
- b. Pegawai Golongan III : 29 orang
- c. Pegawai Golongan II : 165 orang
- d. Pegawai golongan I : -
- e. Jumlah PPNS Satpol PP dan Damkar :
 - 1. PPNS Penyidik Bidang Penegakan : 4 Orang
 - 2. PPNS Penyidik Bidang Perhubungan : 1 Orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan personil/pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didominasi oleh tingkat SLTA 75,98% kemudian Sarjana (S1) sebanyak 11,76% dan Pasca sarjana (S2) sebanyak 3,92%.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

1. Belum adanya personil Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan fungsional.

Solusi :

Memberikan kesempatan kepada ASN Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti diklat fungsional/ diklat teknis di bidang tugas Pol PP.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti :

- a. Sarana dan Prasana seperti APD Fire Rescue dan APD Penyelamatan kondisi saat ini sudah tidak layak;
- b. Tidak tersedianya ruangan pemeriksaan pelanggaran dan Pos Jaga;
- c. Sarana dan Prasarana Satpol PP yang belum sesuai kebutuhan :
 1. Kendaraan Operasional Dalmas Tidak Layak;
 2. Kendaraan Pemadam Kebakaran belum memenuhi Standar;
 3. Belum adanya Kendaraan Alat Berat (Beko Excavator) guna menunjang kegiatan Penertiban Bangunan Liar.

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.

3. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Solusi:

Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomu, sosial dan budaya masyarakat.

4. Belum adanya SOP dalam layanan ganti rugi pada warga yang terkena dampak dari Penegakan Perda.

Solusi :

Tahun ini akan diupayakan untuk pembuatan SOP layanan ganti rugi warga yang terkena dampak dari penegakan Perda dan Perkada.

5. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi terkait.

Solusi:

Meningkatkan Kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

6. Belum adanya Sekretariat PPNS

Solusi :

Penambahan Alokasi Anggaran untuk Sekretariat PPNS guna mengoptimalkan dalam Penyelesaian Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berkaitan kinerja pelayanan Satpol PP, diatur oleh Permendagri 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh Satpol PP adalah :

1. Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Terkait kinerja pelayanan Satpol PP tersebut, pada dasarnya ketiga jenis pelayanan diatas telah terpenuhi dan dilaksanakan. Adapun rasio untuk anggota Satlinmas di Tahun 2019 jumlah Anggota 1939 dengan jumlah RW 312 yaitu 6,2 Per RW, hal ini berarti jumlah anggota Satlinmas di kota Cimahi mendekati standar pelayanan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan patroli sudah dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada waktu dini hari (pukul 04.00 – 06.00 WIB), siang hari (pukul 08.00 – 12.00 WIB) dan malam hari (pukul 19.00 s.d 22.00 WIB).

Namun untuk kinerja pelayanan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agak sulit untuk dicapai, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sampai dengan triwulan III tahun 2020, capaian kinerja Penegakan peraturan daerah target pada 2020 sebesar 75% dengan capaian kinerja 74,73% dengan hasil capaian kinerja 99,64%.

Selain Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Indikator kinerja lainnya terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga menjadi bahan baku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dimana terdapat 2 IKK yang menjadi tolak ukur, yaitu :

1. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, pada akhir tahun Renstra mencapai 1,64 per penduduk.
2. Keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) tentang PSK, PKL, atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Dan untuk Kota Cimahi aturan tentang PSK, PKL atau PMKS ada di Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.

Selain mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, penilaian kinerja Satpol PP juga mengacu kepada Peraturan Walikota Cimahi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cimahi, dimana IKU Satpol PP yang harus dicapai berdasarkan Perwal, Jumlah Anggota Satlinmas tahun 2022 Sebanyak 1.882 Orang dengan penguatan SK myang dikeluarkan oleh Kelurahan dengan perhitungan kebutuhan di wilayah yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kepadatan penduduk.

Sedangkan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan untuk Pemadam Kebakaran Pelaksanaan tugasnya mengacu kepada SPM, IKK, dan IKU sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 69 Tahun 2012 Lampiran II Kemendagri, Permendagri No. 16 Tahun 2009 dan sekarang diubah menjadi PP No. 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal, antara lain :

1. Tingkat response time unit terhadap kejadian kebakaran
2. Persentase fasilitasi kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran
3. Masyarakat terlatih siaga kebakaran.

Terkait dengan pencapaian SPM, IKK, dan IKU Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi pada prinsipnya sudah sepenuhnya terlaksana dan tercapai.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada saat disusunnya dokumen ini, isu-isu strategis yang muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

2.3.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat beberapa isu-isu penting yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain :

1. Berkaitan dengan regulasi yang diterbitkan :
 - a. Pembentukan unit pelaksana Satpol PP di tingkat kecamatan, sehingga dibutuhkan pemerataan personil sampai ke tingkat kecamatan, bila memungkinkan dapat juga sampai ke tingkat kelurahan;
 - b. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi bagian dari Satpol PP, dimana fasilitasi dan pemberdayaannya merupakan wewenang Satpol PP;
 - c. Kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga dibutuhkan pengembangan sistem administrasi pelaksanaan SPM, IKK, dan IKU agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terukur secara objektif;
 - d. Perlunya unit/seksi yang mengkoordinir Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
2. Berkaitan dengan kondisi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Cimahi, antara lain :
 - a. Masih terdapat titik-titik konsentrasi PKL;

- b. Belum terciptanya Penyelesaian atas Pengaduan baik itu dari masyarakat atau dari OPD yang menimbulkan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Kondisi Wilayah dan kepadatan Penduduk Menjadi kendala dalam layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

I		PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Kegiatan	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		

Kabupaten/Kota

**PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

- | | | |
|----------|---|---|
| Kegiatan | 1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | 2 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran |
| | 3 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |

3. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu :

- a. Kurangnya peran serta SOPD terkait lainnya yang memiliki tupoksi langsung terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Masih kurangnya personil lapangan, khususnya personil wanita;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja, dimana kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sudah tidak layak pakai;
- d. Belum adanya pool/garasi kendaraan operasional Satpol PP, dimana saat ini kendaraan operasional Satpol PP diparkir dilapangan depan kantor Satpol PP, sehingga kendaraan operasional kurang terpelihara dan terawat;
- e. Belum adanya komunikasi yang terjalin secara baik antara Satpol PP dengan para stakeholder, sehingga pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Satpol PP kurang optimal;
- f. Kurangnya Personil PPNS dan belum adanya Sekretariat PPNS.

2.3.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Damkar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran, terdapat beberapa isu-isu penting yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya;
2. Pengetahuan dan keterampilan personil masih perlu ditingkatkan sesuai dengan standar kualifikasi personil pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009;
3. Masih kurangnya personil yang mempunyai sertifikasi dan kompetensi khusus untuk melakukan selain tugas-tugas pemadaman, yaitu : tugas-tugas penyuluhan dan sosialisasi, pemeriksaan dan penarikan retribusi alat pemadam kebakaran, instruktur atau trainer, administrasi, pengamanan/provost dan lain sebagainya yang idealnya ditangani oleh Bidang / Seksi yang terpisah baik pencegahan, penanggulangan dan sarana/ prasarana;
4. Tidak berfungsinya fasilitas Hidran Kota sebagai pendukung tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dalam rangka menanggulangi kebakaran yang optimal;
5. Diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai guna mengimbangi pertumbuhan pembangunan gedung tinggi diantaranya tersedianya unit mobil tangga;
6. Kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu serta pintu perlintasan kereta api;
7. RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) belum dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan penanggulangan dan pencegahan kebakaran karena belum dilegalisasi menjadi Peraturan Walikota;
8. Untuk penanggulangan kebakaran dengan mengerahkan 3 (tiga) unit kendaraan Pemadam Kebakaran didukung oleh 10 – 13 orang personil mengakibatkan petugas piket di kantor tersisa satu atau dua orang, yang dikhawatirkan adalah rawannya pengamanan sarana dan prasarana kantor terutama bila terjadi kebakaran dimalam hari;
9. Sarana dan Prasarana (terutama unit kendaraan pemadam kebakaran) yang ada harus selalu dalam keadaan siap setiap saat, sehingga harus selalu diperiksa kesiapannya dan bila ada kerusakan harus segera diperbaiki. Sehingga memerlukan tenaga mekanik yang selalu siap siaga memelihara dan memperbaiki kendaraan, karena

kerusakan bisa terjadi setiap saat. Jumlah mekanik yang tersedia saat ini terbatas, karena mekanik yang ada merangkap sebagai petugas penanggulangan kebakaran.

2.3.3. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Untuk mengatasi isu-isu strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dalam penyusunan Renja Perubahan 2022 ini ada beberapa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi adalah :

1. Melibatkan unsur kasi tramtib kecamatan dan kelurahan dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban wilayah, melalui kegiatan pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda;
2. Memberdayakan dan memberikan pelatihan kepada anggota Satlinmas;
3. Melibatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan tramtibum di wilayah dengan memberikan sosialisasi melalui kegiatan pembinaan tramtibum;
4. Melakukan kajian tentang pembentukan unit/seksi yang secara khusus mengkoordinir (read : koordinator) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
5. Menambah dana/pagu indikatif untuk kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
6. Menambah dana/pagu indikatif untuk Jasa Administrasi Keuangan;
7. Menambah dana/pagu indikatif untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
8. Menambah dana/pagu indikatif untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas;
9. Menambah dana/pagu indikatif untuk kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan;
10. Menambah dana/pagu indikatif untuk kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
11. Menambah dana/pagu indikatif untuk kegiatan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah;

12. Menyesuaikan dan menambah Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai kebutuhan saat ini;
13. Menyesuaikan dana/pagu indikatif Program dan Kegiatan sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Standar Harga Satuan Tertinggi, Standar Biaya Belanja Daerah;
14. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Bidang Tramtibum dan Pemadam Kebakaran dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan serta mengundang narasumber yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan bidang Tramtibum dan Pemadam Kebakaran;
15. Melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang pencegahan bahaya kebakaran ke sekolah-sekolah, masyarakat, serta instansi pemerintah diantaranya melalui penyebaran pamflet waspada kebakaran, dan melakukan dialog dengan masyarakat;
16. Memberikan pelatihan antisipasi/pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat dan dunia usaha;
17. Mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam pendidikan dan pelatihan secara bertahap yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga semua Personil Pemadam Kebakaran Dapat Segera Memenuhi Standar Kualifikasi Personil, Sesuai Dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
18. Mengikutsertakan personil dalam pelatihan-pelatihan pendukung lainnya, seperti latihan internal dan latihan gabungan dengan institusi Pemadam Kebakaran se-Bandung Raya;
19. Dibentuknya tim khusus untuk melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, sosialisasi/penyuluhan, pengamanan, instruktur/trainer, dan mekanik;
20. Melakukan koordinasi dengan PDAM agar dipasang Hidran khususnya untuk suplay air bagi Pemadam Kebakaran yang dipasang di area PDAM;
21. Dilakukan patroli dan monitoring/pemantauan wilayah rawan kebakaran guna memenuhi waktu tanggap (response time) kebakaran

serta mengenali infrastruktur wilayah rawan kebakaran dan bencana lainnya;

22. Menunjuk anggota yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang mekanik pada setiap regu. Bila tidak mampu diatasi, maka diperbaiki di bengkel.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar. Analisis kebutuhan diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2022 dan prakiraan pelaksanaan tahun 2023, standar biaya belanja daerah dan kebutuhan pada saat ini. Hal ini dilakukan karena muatan yang ada pada rancangan awal RKPD dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan OPD saat ini, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain mengacu pada dokumen-dokumen induknya, yaitu Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dalam penyusunan Renja Perubahan 2022 Tahun 2022, Satpol PP dan Damkar juga mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat Kota Cimahi.

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat tersebut diperoleh dari hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) Kota Cimahi, melalui forum group discusion (FGD) tingkat

Kecamatan. Selanjutnya, terhadap usulan tersebut dilakukan penelaahan, apakah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP dan Damkar atau tidak.

Terhadap usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Satpol PP dan Damkar diakomodir dalam Renja Satpol PP dan Damkar tahun 2022, sedangkan usulan program dan kegiatan yang tidak sesuai diserahkan ke OPD yang berkaitan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana program dan kegiatan pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi didasarkan pada pencapaian arah kebijakan dan strategi pembangunan Prioritas Nasional Kementrian Dalam Negeri, Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan peraturan perundang-undangan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengacu kepada kebijakan nasional yang terangkum dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundangan;
2. Pengembangan kompetensi aparatur Satpol PP dan Satlinmas melalui pembinaan dibidang penegakan Perda dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar;

3. Penambahan rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, dan Hak Asasi Manusia;
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Masyarakat, serta bidang Hak Asasi Manusia;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta penegakan Hak Asasi Manusia;
6. Meningkatkan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1.2.1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dalam bentuk tujuan strategis. Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut di atas, Satpol PP Kota Cimahi telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- T1 : Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- T2 : Menurunkan Jumlah Kejadian Kebakaran.

4.1.1.Sasaran

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur,

dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan, sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu:

- T1S1 : Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- T1S2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan.
- T1S3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- T1S4 : Meningkatnya Kualitas Aparatur.
- T2S2 : Meningkatkan Kesiapsiagaan Tanggap Kebakaran.

1.3. Program dan Kegiatan

Judul program dan kegiatan Renja Perubahan 2022 sudah disesuaikan dengan Permendagri 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

I PROGRAM :		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM :		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- | | | |
|----------|---|---|
| Kegiatan | 1 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | 2 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
| | 3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota |

PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- | | | |
|----------|---|---|
| Kegiatan | 1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | 2 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran |
| | 3 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |

Berikut penyajian rencana program dan Kegiatannya serta pendanaannya yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
Renja Perubahan 2022

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Cimahi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum						Sesudah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								23.029.210. 058	26.333.408.625			15,375,897,000					
1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								18.529.641. 958	18.585.206.315			6.959.015.000					
1	0 5	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								425.349.40 0	427.929.400			755.200.000					
1	0 5	0 1	2. 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra Jumlah Forum SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah		85 Indeks	85 Indeks	2 Dokum en 1 Dokum en 1 kali	2 Dokum en 1 Dokum en 1 kali	85 Nilai	85 Nilai	20.566.000	20.536.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LAKIP	85 Indeks	20.200.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah						
1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15.987.012. 758	15.987.013.615			103.615.000				
1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji dan tunjangan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	121 Pegawa i ASN	121 Pegawa i ASN	100 %	100 %	15.931.372.7 58	15.931.373.615	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	0	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	1 Dokum en	1 Dokum en	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	25.000.00 0	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan /Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	12 Dokum en	12 Dokum en	100 %	100 %	45.640.000	45.640.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	78.615.00 0	
1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										92.010.000	87.810.000			625.200.000				
1	0	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Persentase ASN Yang Dibina	Jumlah PDH beserta atribut Jumlah PDL	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi		85 Persen	85 Persen	0 stel 203 Stel	0 stel 203 Stel	100 %	100 %	0	0			Persentase ASN Yang Dibina	85 Persen	350.000.0 00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN Yang Dibina		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi		85 Persen	85 Persen			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Yang Dibina	85 Persen	150.200.000
1	05	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN Yang Dibina	Jumlah Bimbingan Teknis	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi		85 Persen	85 Persen	3 kali	3 kali	100 %	100 %	92.010.000	87.810.000			Persentase ASN Yang Dibina	85 Persen	125.000.000
1	05	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah										389.077.800	530.459.300			1.241.000.000			
1	05	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan penyediaan komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	9.000.000	9.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	24.000.000
1	05	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Penyediaan Alat tulis Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	102.317.000	229.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85.000.000
1	05	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah set Peralatan rumah Tangga	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	20 set	20 set	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum						Sesudah
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Penyediaan bahan pokok/natura Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	100 %	100 %	44.200.000	44.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	170.000.0 00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum		Sesudah				
1		0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Anggaran	1. Jenis Cetak Tata naskah dinas 2. Jumlah Bulan Penyediaan Penggandaan dan Cetak Cover 3. Cetak Sticker Label Barang Bukti 4. Cetak Stiker Segel 5. Cetak Sticker ditutup 6. Pol PP Line 7. Cetak sticker Tanda pemeriksaan 8. Cetak Sticker Rekomendasi Penempatan Alat Proteksi Kebakaran 9. Cetak Sticker No Pelayanan Darurat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	9 Jenis 12 Bulan 100 lembar 100 lembar 110 lembar 1 roll 100 lembar 100 lembar 100 lembar	9 Jenis 12 Bulan 100 lembar 100 lembar 110 lembar 1 roll 100 lembar 100 lembar	100 %	100 %	55.565.800	70.114.300	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	130.000.0 00
1		0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi		85 Persen	85 Persen	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	3.000.000	3.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	12.000.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah						
								Umum															
1	0	0	2.	0		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	45 orang/h ari 201 orang/h ar	45 orang/h ari 201 orang/h ar	100 % i	100 %	174.995.000	174.660.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	800.000.0 00
1	0	0	2.	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										147.000.00 0	162.002.000			450.000.000			
1	0	0	2.	0		Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Anggaran	Filling Cabinet Jumlah kursi Jumlah meja Lemari Arsip	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	6 buah 10 buah 10 buah 2 buah	6 buah 10 buah 10 buah 2 buah	100 %	100 %	0	15.002.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	50.000.00 0
1	0	0	2.	0		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	12 bulan 2 unit	12 bulan 2 unit	100 %	100 %	147.000.000	147.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	400.000.0 00
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										345.090.00 0	340.890.000			1.084.000.000			
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa surat Menyurat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi		85 Persen	85 Persen	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	38.640.000	38.640.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	80.000.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah					
								Umum														
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Jasa Air Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Jumlah Bulan Jasa Listrik	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	60.200.000	56.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	124.000.0 00
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor Jumlah Pegawai Non ASN yang diasuransikan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		85 Persen	85 Persen	12 Bulan 86 Pegawa i	12 Bulan 86 Pegawa i	100 %	100 %	246.250.000	246.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	880.000.0 00
1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.144.102.0 00	1.049.102.000			2.700.000.000			
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah bulan izin Spektrum Radio (ISR) Jumlah Kendaraan Operasional yang diasuransikan Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administrasi Umum		100 Persen	100 Persen	12 Bulan 27 unit 38 unit	12 Bulan 27 unit 38 unit	100 %	100 %	1.092.102.00 0	997.102.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	2.600.000. 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum						
1	0	0	2.	1	Pemeliharaan/ Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Rumah dan Gedung dinas yang dipelihara	Persentase Unit Kerja yang Mendapatka n Pelayanan Administراسي Umum		100 Persen	100 Persen	65 unit	65 unit	100 %	100 %	52.000.000	52.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100 Persen	100.000.0 00
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											2.541.475.0 00	5.790.109.210			4.590.000.000		
1	0	0	2.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											1.799.213.0 00	4.299.269.310			3.380.000.000		
1	0	0	2.	0	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	null	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		0 null	100 Persen	100 Persen	0	0	DBH CHT		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperole h layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 Persen 100 Persen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum						Sesudah	
1	0	0	2.	0	0	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Jumlah pelaksanaan pekat jumlah pelaksanaan penertiban PKL Jumlah penanganan Unjuk Rasa Pelaksanaan Penertiban anak sekolah Penertiban bangunan liar Penertiban Spanduk/balig ho	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	3 kali 12 kali 12 kali 2 kali 3 kali 12 kali	3 kali 12 kali 12 kali 2 kali 3 kali 12 kali	100 Persen 100 Persen	100 Persen	1.290.333.00 0	1.234.773.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penangan an Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperole h layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 Persen 100 Persen	2.000.000. 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum			Sesudah			
1	0	0	2.	0	Koordinasi Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kot a	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	jumlah pelibatan linmas dalam peringatan HBHT Peringatan HUT linmas tingkat kota	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	2 kali 1 kali	2 kali 1 kali	100 Persen	100 Persen	39.750.000	26.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperole h layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 Persen 100 Persen	90.000.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum			Sesudah			
1	0	0	2.	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Jumlah pembinaan Anggota linmas Jumlah Pendataan Anggota Linmas	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	6 kali 1 kali	6 kali 1 kali	100 Persen	100 Persen	61.780.000	1.525.026.310	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperole h layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 Persen 100 Persen	100.000.0 00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah						
1		0 5	0 2	2. 0 1	1 0	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	1. Jumlah Pelayanan Kerugian Materil 2. Jumlah Pelayanan Pengobatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	12 Bangun an 24 kali	12 Bangun an 24 kali	100 Persen	100 Persen	97.200.000	97.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperole h layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 Persen 100 Persen	200.000.0 00
1		0 5	0 2	2. 0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										733.260.00 0	1.481.837.900			1.190.000.000			
1		0 5	0 2	2. 0 2	0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	jumlah pembinaan pelanggaran perda Jumlah penyuluhan ketentraman dan ketertiban	Persentase Warga Negara yang Mendapatka n Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda		100 Persen	100 Persen	12 kali 2 kali	12 kali 2 kali	100 %	100 %	122.980.000	552.687.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum	100 Persen	180.000.0 00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah					
1	0	0	2.	0	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah pendataan pelanggaran perda dan gangguan trantibum jumlah pengawasan pelanggaran perda Papan Himbauan	Persentase Warga Negara yang Mendapatka n Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda		100 Persen	100 Persen	12 kali 12 kali 5 buah	12 kali 12 kali 5 buah	100 %	100 %	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum	100 Persen	60.000.00 0
1	0	0	2.	0	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi barang kena cukai ilegal jumlah penegakan perda dan peraturan walikota jumlah sidang tindak pidana tingan	Persentase Warga Negara yang Mendapatka n Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda		100 Persen	100 Persen	0 kali 10 kali 10 kali	0 kali 10 kali 10 kali	100 %	100 %	592.280.000	911.150.900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum	100 Persen	950.000.0 00
1	0	0	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										9.002.000	9.002.000			20.000.000			
1	0	0	2.	0	Pengembanga n Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dan petugas penegakan perda	Persentase Warga Negara yang Mendapatka n Pelayanan Akibat dari Penegakan Perda		100 Persen	100 Persen	1 kali	1 kali	100 Persen	100 Persen	9.002.000	9.002.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penangana n Gangguan Gangguan Ketentrama n Dan Ketertiban Umum	100 Persen	20.000.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah					
1	0	0			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										1.958.093.100	1.958.093.100		3.826.882.000				
1	0	0	2.0		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										1.584.624.000	1.584.624.000		3.400.000.000				
1	0	0	2.0	0	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	Jumlah patroli siaga kebakaran dan penyelamatan korban	Persentase Korban yang Memperoleh Layanan Penyelamata n dan Evakuasi Kebakaran		100 Persen	100 Persen	720 kali	720 kali	100 %	100 %	1.204.200.000	1.204.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggula nga Kebakaran	100 Persen n	2.400.000.000
1	0	0	2.0	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	Cairan kimia AFFF 3%/6% Jumlah APD khusus kebakaran Jumlah Tabung yang diisi setiap triwulan	Persentase Korban yang Memperoleh Layanan Penyelamata n dan Evakuasi Kebakaran		100 Persen	100 Persen	12 kali 15 set 40 tabung	12 kali 15 set 40 tabung	100 %	100 %	351.893.000	351.893.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggula nga Kebakaran	100 Persen n	500.000.000
1	0	0	2.0	0	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	Jumlah APD khusus penyelamatan dan evakuasi Jumlah sarpras penyelamatan dan evakuasi lainnya	Persentase Korban yang Memperoleh Layanan Penyelamata n dan Evakuasi Kebakaran		100 Persen	100 Persen	5 set 1 set	5 set 1 set	100 %	100 %	28.531.000	28.531.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggula nga Kebakaran	100 Persen n	500.000.000
1	0	0	2.0		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										350.545.200	350.545.200		353.680.000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum			Sesudah			
1	0	0	2.	0	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	Jumlah potensi bangunan gedung yang wajib diperiksa	Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran		100 Persen	100 Persen	250 gedung	250 gedung	100 %	100 %	328.945.200	328.945.200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	100 Persen n	328.680.0 00
1	0	0	2.	0	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	1. Jumlah Pemeriksaan alat proteksi kebakaran	Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran		100 Persen	100 Persen	96 kali	96 kali	100 %	100 %	21.600.000	21.600.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	100 Persen n	25.000.00 0
1	0	0	2.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										22.923.900	22.923.900			73.202.000			
1		0	0	2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulan an Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan an kebakaran	Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran		100 Persen	100 Persen	5 kali	5 kali	100 %	100 %	22.923.900	22.923.900			Persentase Tingkat Kesiapsiagaan Penanggulan gan Kebakaran	100 Persen n	73.20 2.000
TOTAL																23.029.210. 058	26.333.408.625			15,375,897,000		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi 2017-2022. Penyempurnaan atau revisi terhadap sebuah rencana kerja tentu saja sangat dimungkinkan, mengingat sangat dinamisnya perkembangan dunia pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, sehingga Satpol PP dan Damkar sebagai bagian dari Pemerintah Kota Cimahi harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.

Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen ini keberhasilannya akan sangat tergantung oleh sejauhmana kontribusi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kelemahan dan tantangan serta resiko akan tidak berarti bilamana terdapat kesamaan gerak dan cara pandang dalam menyikapinya. Wujud partisipasi masyarakat akan memberikan dorongan yang lebih kuat guna pencapaian cita-cita luhur masyarakat Kota Cimahi sebagaimana dirumuskan dalam visi kota.

Demikian, semoga Rencana Kerja Perubahan 2022 Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730413 199803 1 006